



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

DINAS SOSIAL

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini disusun dalam rangka menyesuaikan arah Kebijakan Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja. Dokumen Rencana Strategis oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu lima tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen ini.

Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai. Agar dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkajene Sidenreng, September 2025
Kepala Dinas Sosial,



WAHIDAH ALWI SP., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP 19710315 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan dan Sasaran	35
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan	39
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	80
BAB VIII PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	15
Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	16
Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur	16
Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel 5. Jumlah Kendaraan Operasional	17
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	19
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial.....	20
Tabel Data Indikator Permendagri 18 Dinas Sosial	21
Tabel Data Indikator SPM Dinas Sosial.....	24
Tabel RSO dan ROO Dinas Sosial.....	25
Tabel Register Resiko Kecurangan Dinas Sosial	28
Tabel 3.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	34
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	36
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	37
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	38
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	40
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.....	43
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	62
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah	78
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan	79
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama	80
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah administrative Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Pangkajene yang berjarak sekitar 183 Km dari Kota Makassar. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas 1.883,25 Km² atau 4,03 persen dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan (38 kelurahan dan 68 desa). Kondisi topografi Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi yakni wilayah daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 mdpl.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan lembaga yang berfungsi sesuai regulasi, memiliki struktur yang jelas dan fokus pada penanganan kemiskinan serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Tujuannya adalah membantu mereka yang kurang beruntung, membangun ketahanan sosial, dan mendorong keadilan sosial melalui berbagai program, bantuan, dan pendampingan. Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menjalankan program seperti validasi DTSEN untuk memastikan tepat sasaran penerima bansos, bantuan alat bantu disabilitas dan lansia terlantar, program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPJS gratis untuk warga tidak mampu, operasi sosial seperti penertiban anak jalanan dan pengamen liar serta koordinasi dengan lembaga provinsi dan



pusat seperti Kemensos. Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang secara konsisten menjalankan fungsi sosial penting dengan basis data yang diperkuat (DTSEN), peningkatan kapabilitas SDM, serta layanan konkret kepada kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, disabilitas, gelandangan/pengemis, anak terlantar, warga yang terkena dampak bencana baik itu bencana alam maupun sosial, korban kekerasan, serta kelompok marginal lainnya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang salah satu Perangkat Daerah yang mampu urusan sosial yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif dengan indikator indeks kesejahteraan sosial dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat, tata kelola, rehabilitasi, dan perlindungan sosial dengan indikator cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh penanganan dan pelayanan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang memuat tujuan,



sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya, selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah urusan sosial.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025-2029 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 yang memuat visi:

“Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”

Dengan misi sebagai berikut (Misi II):

**“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Memperluas
Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan
Perlindungan Sosial Yang Adaptif”**



Dalam pencapaian misi diatas perlu dilakukan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk masyarakat atau stake holder terlibat yang dituangkan dalam Rencana Strategis yang memasuki tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang, termasuk didalamnya pembangunan administrasi kesejahteraan sosial.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 8. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-



- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 12. Keputusan Menteri Koordinator PMK nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah



- Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2022-2023.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk:

1. Sebagai penjabaran atas perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang serta sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dalam mensejahterakan masyarakat.
3. Memberikan arah dan pedoman serta mendayagunakan seluruh potensi yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjawab tuntutan perkembangan permasalahan dan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Rappang dalam kurun waktu 5 tahun.
4. Mempermudah pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Dinas Sosial baik secara internal maupun eksternal.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng



Rappang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Agar dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan.
2. Agar dapat memberikan layanan prima dalam usaha kesejahteraan sosial dengan melibatkan seluruh pelaku (stakeholder) penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
3. Memberikan arah dan pedoman Dinas Sosial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta dalam menentukan indikator, target kinerja jangka menengah Dinas Sosial.
4. Sebagai bahan evaluasi tahunan dan lima tahunan pelaksanaan kegiatan, program dan pencapaian sasaran Dinas Sosial dan Bahan Rujukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 hingga 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN: Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Strategis agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Memuat informasi tentang peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang



dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH:

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN: Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN: Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII - KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN: Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII – PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Adapun fungsi yang merupakan wujud pekerjaan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang Sosial
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Sosial
- d. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial
- e. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang masalah sosial
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi sosial
- h. Pelaksanaan bantuan, jaminan, dan perlindungan sosial
- i. Pengelolaan data fakir miskin



- j. Pembinaan potensi partisipan penanggulangan masalah sosial
- k. Penanganan penyandang masalah sosial
- l. Pelaksanaan rehabilitasi sosial
- m. Pengelolaan taman makam pahlawan
- n. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta kesetiakawanan sosial.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

- *Sub bagian perencanaan dan keuangan* dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan



administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

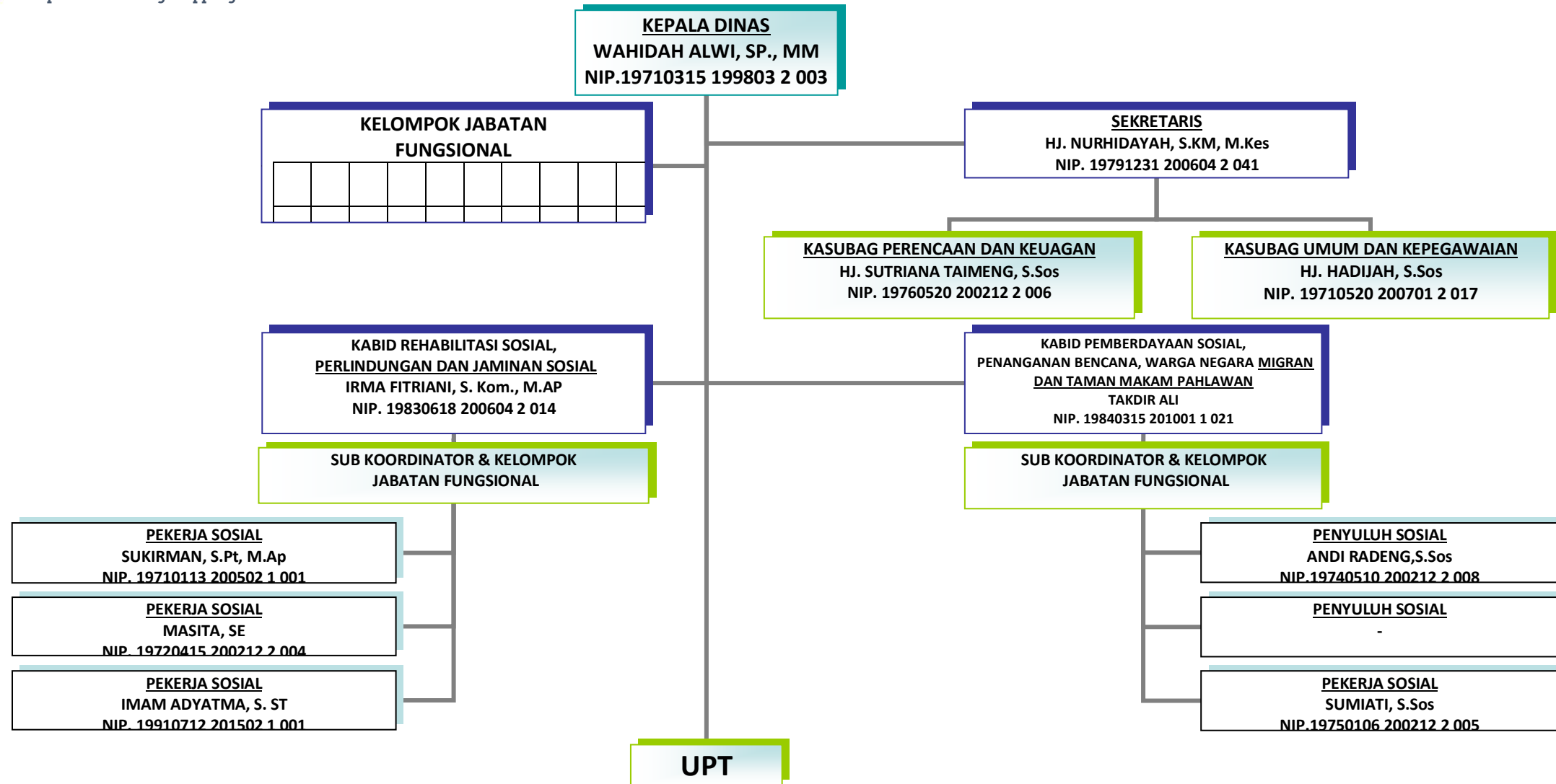
- *Sub bagian umum dan kepegawaian* dipimpin oleh Kepala Sub bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan bencana, warga negara migran, dan taman makam pahlawan.



2.2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), dapat dilihat berupa Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan, Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan, Jumlah Pegawai menurut Umur, dan Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
Golongan IV	1	1	1	1	4	20,00
Golongan III	-	5	6	2	13	65,00
Golongan II	-	2	-	1	3	15,00
Golongan I	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	8	7	4	20	100

Berdasarkan tabel di atas golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 65,00 persen dari total pegawai sebesar 20 orang. Urutan kedua terbesar adalah golongan IV sebesar 20,00 persen sebanyak 4 orang. Selanjutnya sebesar 15,00 persen berada pada golongan II sebanyak 3 orang. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
S-3	-	-	-	-	-	0,00
S-2	1	2	1	-	4	20,00
S-1	-	2	6	3	11	55,00
Diploma I-III	-	1	-	-	1	5,00
SMA Sederajat	-	3	-	1	4	20,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	8	7	4	20	100

Pada tabel di atas dapat dilihat Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 ke atas. Dengan proporsi S1 sebesar 55,00 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 20,00 persen, tingkat Pendidikan Diploma I-III sebesar 5,00 persen, dan SMA Sederajat sebesar 20,00 persen.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
25 – 30	-	-	-	-	-	0,00
31 – 40	-	1	4	-	5	25,00
41 – 50	-	7	3	2	12	60,00
51 – 58	1	-	-	2	3	15,00
Jumlah	1	8	7	4	20	100

Berdasarkan kelompok umur, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada usia 41-50 sebanyak 12 orang atau 60,00 persen, sedangkan kelompok umur 31-40 tahun berada pada urutan kedua dengan jumlah sebanyak 5 orang atau 25,00 persen. Selanjutnya usia 51-58 sebanyak 3 orang atau 15,00 persen. Kelompok usia 25-30 sebanyak 0,00 persen dengan jumlah pegawai sebesar 0 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
Perempuan	1	4	3	3	11	55,00
Laki-Laki	-	4	4	1	9	45,00
Jumlah	1	8	7	4	20	100

Berdasarkan Jenis Kelamin, jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang dengan persentase 55,00 persen dan sebanyak 9 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 45,00 persen.

2.2.2 Dukungan Sarana dan Prasarana

Pendukung sarana dan prasarana dapat dilihat pada Jumlah kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Operasional

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Roda 4	1	2	-	3
Roda 4 Mobil Kementerian	-	2	-	2
Roda 2	3	3	-	6
Roda 2 Motor Kementerian	-	2	-	2
Jumlah	4	9	0	13



Kendaraan dinas yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 13 unit, dengan rincian Roda 4 kondisi baik sebanyak 1 unit dan rusak ringan sebanyak 2 unit. Roda 4 (Mobil Kementerian) kondisi rusak ringan sebanyak 2 unit. Roda 2 kondisi baik sebanyak 3 unit, kondisi rusak ringan sebanyak 3 unit. Roda 2 (Motor Kementerian) kondisi rusak ringan sebanyak 2 unit.

2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu capaian kinerja juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2025-2029.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23
1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial				90	95	100	100	100	93.7	14,71	30	34	34					
2	Persentase PMKS Yang Tertangani								100	93.7	65,93	30	34	34					
3	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar								100	52.7	21,50	20	34	34					
4	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya								TIDAK ADA BANTUAN	100	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	TIDAK ADA BANTUAN	0	0	0	0	0
5	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial								TIDAK ADA WAHANA	100	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	0	0	0	0	0
7	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial								100	100	0,19	0,19	0,19	0,19					



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	451,965,500	978,883,500	451,965,500			352,297,835						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	281,946,000	147,378,000	281,946,000			195,511,570						
Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58,021,000	109,038,500	58,021,000			57,336,000						
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	199,127,500	411,200,000	199,127,500			70,933,266						
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma												
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	400,176,000	650,000,000	400,176,000			391,956,500						
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	759,731,000	643,435,000	759,731,000			752,449,208						
Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	104,998,000	172,000,000	104,998,000			100,866,500						
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	87,460,000	72,450,000	87,460,000			86,569,000						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		2,639,791,180	2,657,270,300	2,166,854,800	2,201,071,500		2,540,270,685	2,540,920,973	2,110,660,632	2,179,920,906		
Program Pemberdayaan Sosial		825,760,000	789,105,400	253,745,700	192,216,000		789,105,400	96,192,700	252,240,800	84,961,140		
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program Rehabilitasi Sosial		738,234,000	720,597,799	139,150,000	200,332,000		720,597,799	35,863,500	126,753,867	188,315,797		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		504,808,000	412,487,700	94,850,000	409,108,000		497,417,470	370,583,700	75,969,000	257,323,711		
Program Penanganan Bencana		200,511,000	174,725,200	139,452,200	198,184,500		198,490,400	138,704,700	40,657,000	197,955,500		
Program Penanganan Taman Makam Pahlawan		37,449,000	34,998,100	10,741,300	27,419,000		35,847,400	34,906,150	10,690,200	27,389,000		



DATA INDIKATOR PERMENDAGRI 18 DINAS SOSIAL

No.	Indikator Permendagri 18	Satuan	Realisasi										TARGET RKPD		Target RPJMD					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Outcome	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan. Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)	%	0,57	-	0,68	1,7	0,46	2.07	917	3,04			100	100	100	100	100	100	100	100
1.1	Jumlah Layanan Data Dan Pengaduan Yang Dimiliki	Buah	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	100	120	100	120	150	170	190	200
1.2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM Dan OTM	Orang	-	-	-	-	-	2	237	10	16686	5121	80	100	80	100	120	100	90	50
1.3	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk	Tim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Dijangkau	Orang	17	-	20	50	10	73	244	90	59	127	20	30	20	30	50	60	70	80
1.5	Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan Yang Dimiliki	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	0	0	0
1.6	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	Orang	17	-	20	30	10	45	199	66	11	58	10	14	10	14	16	19	22	25
1.7	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara Yang Dimiliki Sesuai Standar	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	0	0	0
1.8	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang	Orang	-	-	-	20	-	4	109	3	5	1	10	14	10	14	16	19	22	25
1.9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu	Orang	-	-	-	-	-	-	1	-	0	9	5	9	5	9	11	14	17	20
1.10	Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia Di Rumah Singgah/Shelter	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL****Kabupaten Sidenreng Rappang**

1.11	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	0				0	0	0	0	0	0
1.12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	3	0				0	0	0	0	0	0
1.13	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan Di Rumah Singgah	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
1.14	Jumlah Pekerja Sosial Profesional Dan/Atau TKS Dan/Atau Relawan Sosial Yang Disediakan	Orang	150	157	189	191	189	189	187				150	150	150	150	150	150	150	150
1.15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Dan Sosial Sesuai Standar Di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter Dan/Atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	-	-	-	-	-	-	14	6	21		10	14	10	14	16	19	22	25
1.16	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga Dan Masyarakat	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	2	13	12		15	19	15	19	21	24	27	30
1.17	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Orang	-	-	-	-	-	7	5	12	3		5	9	5	9	11	14	17	20
1.18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Orang	-	-	-	-	-	1	6	10	5		10	14	10	14	16	19	22	25
1.19	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Orang	-	-	-	-	-	19	2	90	54		5	9	5	9	11	14	17	20
1.20	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga	Orang	-	-	-	-	-	1	4	4	13		5	9	5	9	11	14	17	20
1.21	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Dirujuk	Orang	-	-	-	-	-	1	5	3	3		4	6	4	6	8	10	12	15

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL****Kabupaten Sidenreng Rappang**

Outcome	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Makanan	Orang			245	56	565	396	1952	1321	107	300	450	450	450	450	450	450	450	450
2.2	Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang	Orang			245	357	565	396	1952	1321	246		450	450	450	450	450	450	450	450
2.3	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Yang Dimiliki	Unit			10	10	10	10	10	10	10		5	5	5	5	5	5	5	5
2.4	Jumlah Paket Permakanan Khusus Bagi Kelompok Tertentu	Paket			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang			122	178	282	0	154	254	16		450	450	450	450	450	450	450	450
2.6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial Dan/Atau Relawean Sosial Yang Tersedia	Orang			78	78	78	78	77	77	73	37	71	71	71	71	71	71	71	71



DATA INDIKATOR SPM DINAS SOSIAL																						
No	Indikator SPM	Satuan	Realisasi										TARGET RKPD		Target RPJMD						Permasalahan (Analisis)	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%				100	100	73%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100		100		90,2%	33%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100		100	100	100	7%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
4	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
5	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		



RSO dan ROO
Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Kejadian Risiko			Ket	RTP
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak		
I	Risiko Operasional Pemda						
1	Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana bimbingan fisik dan mental dalam perencanaan tahunan. - Berkoordinasi dengan pihak terkait (Bappeda, Dinkes, dan pihak ketiga) untuk dukungan fasilitas. - Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana secara detail. - Mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada dengan penjadwalan terintegrasi.	Nota dinas - Rapat koordinasi - Email dinas - Dokumen perencanaan kegiatan	Jan - Des 2025	Jumlah penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Gepeng yang ditangani pemerintah selama ini belum sebanding dengan jumlah populasi penyandang disabilitas, anak lanjut usia, gelandangan dan pengemis	Penyimpangan perilaku yang cenderung mengarah kepada perbuatan yang merugikan sendiri dan masa depan		Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana bimbingan fisik dan mental dalam perencanaan tahunan. - Berkoordinasi dengan pihak terkait (Bappeda, Dinkes, dan pihak ketiga) untuk dukungan fasilitas. - Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana secara detail. - Mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada dengan penjadwalan terintegrasi.
2	Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dukungan fasilitas. - Mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada dengan penjadwalan terintegrasi.	Nota dinas - Rapat koordinasi - Email dinas - Dokumen perencanaan kegiatan	Jan - Des 2025	*Kurangnya perhatian keluarga kepada Anak Terlantar, Disabilitas, Lanjut Usia, dan Gelandangan Pengemis sehingga mereka menjadi terlantar dan menggelandang mengharapkan uluran tangan dan belas kasih masyarakat *Kurangnya perhatian keluarga disabilitas dan lansia untuk melaporkan kepada DINSOS sehingga mereka menjadi terlantar	Perilaku yang menyimpang meresahkan masyarakat		Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana bimbingan fisik dan mental dalam perencanaan tahunan. - Berkoordinasi dengan pihak terkait (Bappeda, Dinkes, dan pihak ketiga) untuk dukungan fasilitas. - Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana secara detail. - Mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada dengan penjadwalan terintegrasi.

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL****Kabupaten Sidenreng Rappang**

3	Menyusun dan mensosialisasikan SOP verifikasi data. - Melakukan pelatihan verifikasi data bagi petugas lapangan. - Membentuk tim khusus verifikasi data. - Melakukan uji petik dan validasi berkala terhadap data penerima manfaat. - Menjalin koordinasi rutin antar bidang terkait untuk sinkronisasi data	Surat edaran - Grup WhatsApp/Telegram internal - Email dinas - Rapat koordinasi (luring/daring) - Laporan berkala	Jan - Des 2025	Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial tidak memadai, dan tidak tertanganinya PMKS secara maksimal	Menimbulkan Kesalahpahaman masyarakat karena adanya PMKS tidak tertangani	Menyusun dan mensosialisasikan SOP verifikasi data. - Melakukan pelatihan verifikasi data bagi petugas lapangan. - Membentuk tim khusus verifikasi data. - Melakukan uji petik dan validasi berkala terhadap data penerima manfaat. - Menjalin koordinasi rutin antar bidang terkait untuk sinkronisasi data
4	Menyusun dan mensosialisasikan SOP verifikasi data. - Melakukan pelatihan verifikasi data bagi petugas lapangan. - Membentuk tim khusus verifikasi data. - Melakukan uji petik dan validasi berkala terhadap data penerima manfaat. - Menjalin koordinasi rutin antar bidang terkait untuk sinkronisasi data	Surat edaran - Grup WhatsApp/Telegram internal - Email dinas - Rapat koordinasi (luring/daring) - Laporan berkala	Jan - Des 2025	Kurang Sumber Daya yang Ada	Data Tidak Akurat	Menyusun dan mensosialisasikan SOP verifikasi data. - Melakukan pelatihan verifikasi data bagi petugas lapangan. - Membentuk tim khusus verifikasi data. - Melakukan uji petik dan validasi berkala terhadap data penerima manfaat. - Menjalin koordinasi rutin antar bidang terkait untuk sinkronisasi data
5	Mengurangi jumlah barang yang diserahkan ke LKSA	Rapat Koordinasi, surat edaran	Jan - Des 2025	Berkurangnya Anggaran untuk Keperluan LKS/ Lembaga organisasi	Kebutuhan Barang untuk LKS/ Lembaga Organisasi tidak memadai atau tidak sesuai dengan kabutuhan	Mengurangi jumlah barang yang diserahkan ke LKSA
6	Membangun SOP penyediaan permakanaan. - Melakukan pemutakhiran dan integrasi data DTKS secara berkala. - Membentuk tim tanggap darurat sosial di tingkat daerah.	Surat resmi koordinasi. - Grup WhatsApp/Telegram lintas OPD. - Aplikasi sistem informasi penanganan bencana. - Forum tatap muka rutin. - Media sosial resmi Dinas Sosial.	Jan - Des 2025	Tidak dapat memastikan penduduk yg terdampak situasi darurat memiliki akses yg memadai terhdp makanan ut memenuhi kebutuhan	Terjadi potensi pemborosan, adanya biaya tambahan, serta bantuan tidak tepat sasaran	Membangun SOP penanganan bencana berbasis DTKS. - Melakukan koordinasi aktif dengan BPBD dan lembaga sosial. - Melakukan pemutakhiran dan integrasi data DTKS secara berkala. - Membentuk tim tanggap darurat sosial di tingkat daerah. - Menyusun simulasi dan pelatihan rutin dengan stakeholder terkait.



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

7	Membangun SOP penanganan bencana berbasis DTKS. - Melakukan koordinasi aktif dengan BPBD dan lembaga sosial. - Melakukan pemutakhiran dan integrasi data DTKS secara berkala. - Membentuk tim tanggap darurat sosial di tingkat daerah. - Menyusun simulasi dan pelatihan rutin dengan stakeholder terkait.	Surat resmi koordinasi. - Grup WhatsApp/Telegram lintas OPD. - Aplikasi sistem informasi penanganan bencana. - Forum tatap muka rutin. - Media sosial resmi Dinas Sosial.	Jan - Des 2025	Kurangnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, tingkat resiko bencana, keterlibatan komunitas dan sektor swasta	dikarenakan jumlah org yg terlibat bervariasi tergantung pada sumber daya yang tersedia	Membangun SOP penanganan bencana berbasis DTKS. - Melakukan koordinasi aktif dengan BPBD dan lembaga sosial. - Melakukan pemutakhiran dan integrasi data DTKS secara berkala. - Membentuk tim tanggap darurat sosial di tingkat daerah. - Menyusun simulasi dan pelatihan rutin dengan stakeholder terkait.
8	Membangun SOP pemeliharaan taman makam pahlawan. - Membentuk tim pemeliharaan taman makam pahlawan.	Kegiatan pengendalian telah dilakukan cukup efektif namun belum sepenuhnya menangani risiko yang teridentifikasi	Jan - Des 2025	Kurangnya kesadaran akan pentingnya memelihara warisan sejarah, keterlibatan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, dan keterlibatan organisasi	Kerusakan pada infrastruktur dan lingkungan taman makam pahlawan	Membangun SOP pemeliharaan taman makam pahlawan. - Membentuk tim pemeliharaan taman makam pahlawan.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak		
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Peran dan layanan Dinas Sosial kurang efektif	RSO.25.10.05.01		Tidak optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial yang dilakukan secara berkala	Layanan pengentasan kemiskinan pada dinas sosial kurang efektif		Implementasi Sistem Informasi Terpadu untuk verifikasi dan validasi data penerima bantuan



REGISTER RESIKO KECURANGAN

DINAS SOSIAL

TAHUN 2025

No.	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi	Status Risiko
						Likelihood	Dampak	Skala			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Tahap Perencanaan										
1	Penambahan program/ kegiatan titipan dari pihak tertentu pada saat perencanaan penganggaran	Oknum pejabat di dalam dan diluar instansi menitipkan program/kegiatan pada saat perencanaan anggaran dengan memberikan janji atau imbalan berupa uang atau barang	Kepala Dinas	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku	1. SOP 2. Pakta Integritas 3. Sosialisasi anti fraud	2	2	7,00	1. Budaya kerja yang kurang baik 2. Reputasi/nama organisasi/OPD menjadi buruk	1. Sosialisasi anti kecurangan 2. Penegasan komitmen anti kecurangan	
2	Maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pendataan calon penerima bansos	Oknum pejabat/pegawai memanipulasi data pendukung anggaran dengan tujuan mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan pribadi/orang lain	Kepala Dinas	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku	1. SOP 2. Pakta Integritas 3. Sosialisasi anti fraud	2	3	11,00	1. Budaya kerja yang kurang baik 2. Reputasi/nama organisasi/OPD menjadi buruk	1. Sosialisasi anti kecurangan 2. Penegasan komitmen anti kecurangan	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

3	Pejabat berwenang mengesampingkan pengendalian dengan tidak melakukan verifikasi/reviu/validasi data calon penerima bansos	Oknum pejabat/pegawai memanipulasi data pendukung anggaran dengan tujuan mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan pribadi/orang lain	Kepala Dinas	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku	1. SOP 2. Pakta Integritas 3. Sosialisasi anti fraud	2	3	11,00	Reputasi/nama organisasi/OPD menjadi buruk	1. Sosialisasi anti kecurangan 2. Penegasan komitmen anti kecurangan	
B	Tahap Pelaksanaan										
1	Manipulasi nilai pembelian barang.	Pejabat/pegawai membuat bukti pembelian yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya/mark up	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan tim verifikasi	1. SOP 2. Pakta Integritas 3. Sosialisasi anti fraud	2	3	11,00	1. Budaya kerja yang kurang baik 2. Reputasi/nama organisasi/OPD menjadi buruk	1. Sosialisasi anti kecurangan 2. Penegasan komitmen anti kecurangan	
2	Adanya pemotongan atau pungutan liar dari pejabat/petugas kegiatan terkait kepada bank/pos penyalur/penerima bantuan selama proses pencairan	Pejabat/pegawai membuat bukti pembelian yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya/mark up	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan tim verifikasi	1. SOP 2. Pakta Integritas 3. Sosialisasi anti fraud	2	3	11,00	1. Budaya kerja yang kurang baik 2. Reputasi/nama organisasi/OPD menjadi buruk	1. Sosialisasi anti kecurangan 2. Penegasan komitmen anti kecurangan	
C	Tahap Pelaporan/ Pertanggungjawaban										

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

1	Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan.	Oknum pegawai/penanggungjawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar/tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya	Kepala Dinas	Kelalaian PPK dalam menerima hasil pekerjaan	1. SOP 2. Pakta Integritas 3. Sosialisasi anti fraud	2	2	7,00	1. Budaya kerja yang kurang baik 2. Reputasi/nama organisasi/OPD menjadi buruk	1. Sosialisasi anti kecurangan 2. Penegasan komitmen anti kecurangan	
2	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar.	Oknum pegawai/penanggungjawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar/tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya	Kepala Dinas	Kelalaian PPK dalam menerima hasil pekerjaan	1. SOP 2. Pakta Integritas 3. Sosialisasi anti fraud	2	2	7,00	1. Budaya kerja yang kurang baik 2. Reputasi/nama organisasi/OPD menjadi buruk	1. Sosialisasi anti kecurangan 2. Penegasan komitmen anti kecurangan	



2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tentu melakukan kerja sama baik antara Dinas dalam lingkup Pemerintahan Daerah, Desa/Kelurahan maupun instansi lainnya. Berikut beberapa instansi yang menjadi mitra layanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah Desa/Kelurahan terkait layanan terpadu yang memudahkan pengidentifikasian kebutuhan masyarakat serta bagaimana menghubungkan masyarakat dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BPJS Kesehatan dalam hal ini untuk mempermudah pendaftaran, aktivasi dan validasi jaminan kesehatan masyarakat miskin. Hal ini juga termasuk pendistribusian peserta BPJS.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait menerbitkan dan mencari tahu identitas dalam hal ini NIK atau No. KK orang atau jiwa terlantar yang tidak diketahui identitasnya.

Kepolisian dan Satpol bersama-sama dengan Dinas Sosial dalam melakukan razia atau penanganan anak terlantar, gelandangan/pengemis serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya baik itu ditempat umum maupun ditempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dinas Ketenagakerjaan kerja sama dalam memulangkan atau mengembalikan warga migran terlantar ke tempat asalnya.



Selanjutnya Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan terlantar.

Selanjutnya Bulog bersama Dinas Sosial dalam penyediaan dan penyaluran bantuan baik itu berupa beras maupun bahan pokok lainnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan perbedaan/kesenjangan pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dirumuskan dari Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dirumuskan permasalahan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pekerja sosial
2. Masih ada PPKS yang belum tertangani
3. Rendahnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial
4. Validasi dan akurasi data DTSEN
5. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana untuk melengkapi tahapan-tahapan



yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian dan penyelenggaraan pangan karena dampaknya signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa tiga tahun mendatang.

1. Prediksi kemiskinan masih menjadi isu strategis utama
2. Adanya perubahan regulasi dari pusat
3. Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
5. Terbangunnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Sidenreng Rappang

Penentuan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang disimpulkan dari permasalahan layanan, isu KLHS, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Teknik menyimpulkan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dijabarkan pada tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Masyarakat Kabupaten Sidrap gemar bergotong royong 2. Masyarakat Kabupaten Sidrap membantu masyarakat miskin 3. Masyarakat Kabupaten Sidrap membantu masyarakat terdampak bencana alam/sosial	1. Kurangnya SDM pekerja sosial sehingga masih ada PPKS yang belum tertangani 2. Masih ada PPKS yang belum mendapatkan bantuan sosial karena belum masuk dalam DTKS		1. Perubahan Iklim Global 2. Pembangunan Berkelanjutan 3. Kemajuan Teknologi	1. Pemanfaatan Bonus Demografi 2. Kemiskinan ekstrem dan ketimpangan pendapatan 3. Prevalensi stunting	1. Pusat pertumbuhan ekonomi baru 2. Konektivitas wilayah 3. Hilirisasi komoditas unggulan 4. Swasembada pangan, air dan energi	1. Prediksi kemiskinan masih menjadi isu strategis utama 2. Adanya perubahan regulasi dari pusat 3. Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 4. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 5. Terbangunnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang dicapai dimasa mendatang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan pembangunan sosial selama 5 (lima) tahun yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Sedangkan sasaran pembangunan sosial selama lima tahun yang akan datang adalah:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 sebagaimana berikut ini:



TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
FINAL RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL											
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial (%)	0	47,8	56,4	62,3	67,3	70,1	72,2	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip (Angka)	61,85	64,50	67,20	70,50	72,80	74,20	76,50	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Adapun strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

- Melakukan pendataan dan inventarisir jumlah penduduk dan PSKS yang mendukung penanggulangan kemiskinan serta peningkatan upaya penanganan PPKS

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang maju dan sejahtera salah satu tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dengan tahapan pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
1. Peningkatan kapasitas PSKS	1. Peningkatan kapasitas PSKS	Peningkatan kapasitas PSKS	1. Peningkatan kapasitas PSKS	1. Peningkatan kapasitas PSKS
2. Pemadanan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	2. Pemadanan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	1. Pemadanan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	2. Pemadanan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	2. Pemadanan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial
3. Peningkatan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	3. Peningkatan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2. Peningkatan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	3. Peningkatan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	3. Peningkatan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

Arah kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas/kelembagaan SDM pelaksana
2. Optimalisasi Penanganan PPKS
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial
4. Perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
		Mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan program bantuan sosial tepat sasaran, memperkuat jejaring pelayanan dasar bagi kelompok rentan, mengembangkan kewirausahaan lokal, dan memperluas akses terhadap sumber daya produktif	1. Peningkatan kapasitas/kelembagaan SDM pelaksana 2. Optimalisasi Penanganan PPKS 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial 4. Perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dibuat, selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang guna mewujudkan visi Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penentuan Program, kegiatan dan subkegiatan didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), tujuan dan sasaran Renstra, *outcome* dan *ouput* beserta indikatornya. Teknis merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 dijabarkan pada tabel 4.1 berikut:

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.271.000.000		7.229.701.575		7.117.210.614		7.490.179.321		7.780.738.517	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.449.000.000		5.882.701.575		6.240.210.614		6.536.179.321		6.743.738.517	
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.449.000.000	100	5.882.701.575	100	6.240.210.614	100	6.536.179.321	100	6.743.738.517	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					243.000.000		283.000.000		313.000.000		355.000.000		403.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial yang Meningkatkan Kapasitas Masyarakat	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	83	100	100	243.000.000	100	283.000.000	100	313.000.000	100	355.000.000	100	403.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					200.000.000		600.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100	100	100	200.000.000	100	600.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Menjangkau Masyarakat Rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial (%)	100	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					144.000.000		179.000.000		214.000.000		249.000.000		284.000.000	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	100	100	100	144.000.000	100	179.000.000	100	214.000.000	100	249.000.000	100	284.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	33	100	100	150.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
TOTAL KESELURUHAN					4.271.000.000		7.229.701.575		7.117.210.614		7.490.179.321		7.780.738.517	



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL							
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif				Indeks Kesejahteraan Sosial (%)		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial			Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani (%)		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial yang Meningkatkan Kapasitas Masyarakat		Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Sumbangan Daerah yang Terkumpul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Tertangani	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	1.06.02.2.03.0010 - Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Kelompok Rentan		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi			
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanaan	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
			Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Menjangkau		Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Masyarakat Rentan				
				Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Bencana Kabupaten/Kota			
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Di Pulangkan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)		
					Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

**RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.271.000.000		7.229.701.575		7.117.210.614		7.490.179.321		7.780.738.517		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.449.000.000		5.882.701.575		6.240.210.614		6.536.179.321		6.743.738.517		
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	3.449.000.000	100	5.882.701.575	100	6.240.210.614	100	6.536.179.321	100	6.743.738.517	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96.000.000		110.000.000		130.000.000		150.000.000		175.000.000		
Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	96.000.000	6	110.000.000	6	130.000.000	6	150.000.000	6	175.000.000		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6		6		6		6		6			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		85.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	60.000.000	6	65.000.000	6	70.000.000	6	75.000.000	6	85.000.000		
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	3	12.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000		
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				12.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	3	12.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6	12.000.000	6	15.000.000	6	20.000.000	6	25.000.000	6	30.000.000		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.135.000.000		4.455.701.575		4.697.210.614		4.917.179.321		5.030.738.517		
Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	2.135.000.000	12	4.455.701.575	12	4.697.210.614	12	4.917.179.321	12	5.030.738.517		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	300	252		252		252		252		252			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.100.000.000		4.416.701.575		4.653.210.614		4.868.179.321		4.975.738.517		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	300	252	2.100.000.000	252	4.416.701.575	252	4.653.210.614	252	4.868.179.321	252	4.975.738.517		
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				18.000.000		20.000.000		23.000.000		25.000.000		28.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	18.000.000	12	20.000.000	12	23.000.000	12	25.000.000	12	28.000.000		
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				17.000.000		19.000.000		21.000.000		24.000.000		27.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	17.000.000	1	19.000.000	1	21.000.000	1	24.000.000	1	27.000.000		
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000		29.000.000		32.000.000		36.000.000		42.000.000		



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	25.000.000	2	29.000.000	2	32.000.000	2	36.000.000	2	42.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	3		3		3		3		3			
1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		14.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	12.000.000	2	14.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	2	20.000.000		
1.06.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				13.000.000		15.000.000		17.000.000		19.000.000		22.000.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	3	13.000.000	3	15.000.000	3	17.000.000	3	19.000.000	3	22.000.000		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				47.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		
Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	21	47.000.000	21	52.000.000	21	52.000.000	21	52.000.000	21	52.000.000		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	21		21		21		21		21			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	15		15		15		15		15			
1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	21	20.000.000	21	20.000.000	21	20.000.000	21	20.000.000	21	20.000.000		
1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	21	7.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000		
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	15	10.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000		
1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000		
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				180.000.000		180.000.000		211.000.000		211.000.000		211.000.000		
Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	180.000.000	4	180.000.000	4	211.000.000	4	211.000.000	4	211.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	210	120		120		120		120		120			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	5.000.000	4	5.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000		170.000.000		201.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	210	120	170.000.000	120	170.000.000	120	201.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				350.000.000		380.000.000		400.000.000		430.000.000		450.000.000		
Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	350.000.000	4	380.000.000	4	400.000.000	4	430.000.000	4	450.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4		4		4		4		4			
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	120.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		100.000.000		110.000.000		130.000.000		150.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	80.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	3	130.000.000	3	150.000.000		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.500.000		218.500.000		218.500.000		218.500.000		220.500.000		
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	211.500.000	12	218.500.000	12	218.500.000	12	218.500.000	12	220.500.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.500	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.500	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		14.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	10.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	14.000.000		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				165.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	165.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				404.500.000		457.500.000		499.500.000		521.500.000		562.500.000		
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	404.500.000	1	457.500.000	1	499.500.000	1	521.500.000	1	562.500.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	13		13		13		13		13			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	39		39		39		39		39			
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				196.200.000		216.200.000		236.200.000		236.200.000		246.200.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	13	196.200.000	13	216.200.000	13	236.200.000	13	236.200.000	13	246.200.000		
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36.300.000		46.300.000		56.300.000		66.300.000		86.300.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	36.300.000	13	46.300.000	13	56.300.000	13	66.300.000	13	86.300.000		
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.000.000		25.000.000		27.000.000		29.000.000		30.000.000		
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	39	22.000.000	39	25.000.000	39	27.000.000	39	29.000.000	39	30.000.000		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		200.000.000		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	150.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				243.000.000		283.000.000		313.000.000		355.000.000		403.000.000		
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial yang Meningkatkan Kapasitas Masyarakat	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	83	100	243.000.000	100	283.000.000	100	313.000.000	100	355.000.000	100	403.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.000.000		8.000.000		8.000.000		10.000.000		13.000.000		
Persentase Sumbangan Daerah yang Terkumpul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	10.000.000	4	13.000.000		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				8.000.000		8.000.000		8.000.000		10.000.000		13.000.000		
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	10.000.000	4	13.000.000		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				235.000.000		275.000.000		305.000.000		345.000.000		390.000.000		



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Tertangani	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	46	235.000.000	46	275.000.000	46	305.000.000	46	345.000.000	46	390.000.000		
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	7		7		7		7					
	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	0	100		100		100		100		100			
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				75.000.000		95.000.000		105.000.000		125.000.000		145.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	7	75.000.000	7	95.000.000	7	105.000.000	7	125.000.000	7	145.000.000		
1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		95.000.000		
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	0	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	95.000.000		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	46	110.000.000	46	120.000.000	46	130.000.000	46	140.000.000	46	150.000.000		



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Di Pulangkan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000		
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				200.000.000		600.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar PantI (%)	100	100	200.000.000	100	600.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar PantI (%)	100	100		100		100		100					
	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar PantI (%)	100	100		100		100		100					
	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100	100		100		100		100					



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				177.000.000		500.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	14	177.000.000	16	500.000.000	19	57.000.000	22	57.000.000	25	57.000.000		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	9		11		14		17		20			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	14		16		19		22		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	9		11		14		17		20			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	9		11		14		17		20			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	14		16		19		22		25			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	14		16		19		22		25			
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	9		11		14		17		20			
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	14		16		19		22		25			
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.188	19		21		24		27		30			



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				15.000.000		50.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	14	15.000.000	16	50.000.000	19	15.000.000	22	15.000.000	25	15.000.000		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				15.000.000		50.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	14	15.000.000	16	50.000.000	19	5.000.000	22	5.000.000	25	5.000.000		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				20.000.000		50.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	9	20.000.000	11	50.000.000	14	5.000.000	17	5.000.000	20	5.000.000		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				15.000.000		50.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	9	15.000.000	11	50.000.000	14	5.000.000	17	5.000.000	20	5.000.000		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				35.000.000		50.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	14	35.000.000	16	50.000.000	19	5.000.000	22	5.000.000	25	5.000.000		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				35.000.000		50.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.188	19	35.000.000	21	50.000.000	24	5.000.000	27	5.000.000	30	5.000.000		



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.000.000		50.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	14	9.000.000	16	50.000.000	19	4.000.000	22	4.000.000	25	4.000.000		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				14.000.000		50.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	14	14.000.000	16	50.000.000	19	4.000.000	22	4.000.000	25	4.000.000		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				14.000.000		50.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	9	14.000.000	11	50.000.000	14	4.000.000	17	4.000.000	20	4.000.000		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000		50.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	9	5.000.000	11	50.000.000	14	5.000.000	17	5.000.000	20	5.000.000		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				23.000.000		100.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	120	23.000.000	150	100.000.000	170	8.000.000	190	8.000.000	200	8.000.000		
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	6		8		10		12		15			



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				11.500.000		50.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	120	11.500.000	150	50.000.000	170	4.000.000	190	4.000.000	200	4.000.000		
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				11.500.000		50.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	6	11.500.000	8	50.000.000	10	4.000.000	12	4.000.000	15	4.000.000		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Menjangkau Masyarakat Rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial (%)	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	15	80.000.000	20	80.000.000	25	80.000.000	30	80.000.000	35	80.000.000		
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	55	15		20		25		30		35			
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	12.951	40		50		60		70		80			
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0	40		60		80		100		120			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0	40	5.000.000	60	5.000.000	80	5.000.000	100	5.000.000	120	5.000.000		
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	15	15.000.000	20	15.000.000	25	15.000.000	30	15.000.000	35	15.000.000		



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	55	15	30.000.000	20	30.000.000	25	30.000.000	30	30.000.000	35	30.000.000		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	12.951	40	30.000.000	50	30.000.000	60	30.000.000	70	30.000.000	80	30.000.000		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				144.000.000		179.000.000		214.000.000		249.000.000		284.000.000		
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	100	100	144.000.000	100	179.000.000	100	214.000.000	100	249.000.000	100	284.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		
Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	100.000.000	300	125.000.000	300	150.000.000	300	175.000.000	300	200.000.000		
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	450		450		450		450		450			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	450		450		450		450		450			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	450		450		450		450		450		450	



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	450	40.000.000	450	45.000.000	450	50.000.000	450	55.000.000	450	60.000.000		
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	450	15.000.000	450	20.000.000	450	25.000.000	450	30.000.000	450	35.000.000		
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	15.000.000	300	20.000.000	300	25.000.000	300	30.000.000	300	35.000.000		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	450	15.000.000	450	20.000.000	450	25.000.000	450	30.000.000	450	35.000.000		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	15.000.000	5	20.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				44.000.000		54.000.000		64.000.000		74.000.000		84.000.000		
Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	37	26	44.000.000	26	54.000.000	26	64.000.000	26	74.000.000	26	84.000.000		
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	0	3		3		3		3		3			



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL

Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				22.000.000		27.000.000		32.000.000		37.000.000		42.000.000		
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	0	3	22.000.000	3	27.000.000	3	32.000.000	3	37.000.000	3	42.000.000		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				22.000.000		27.000.000		32.000.000		37.000.000		42.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	37	26	22.000.000	26	27.000.000	26	32.000.000	26	37.000.000	26	42.000.000		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	33	100	150.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	14	150.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	14	150.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000		

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH FINAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	47,8	56,4	62,3	67,3	70,1	72,2	
5	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Penanganan PPKS	%	34	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan. Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	



Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah urusan sosial, maka berikut diuraikan daftar subkegiatan prioritas pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 pada tabel berikut:

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL				
1.	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial yang Meningkatkan Kapasitas Masyarakat	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Kelompok Rentan	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	



			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
3.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Menjangkau Masyarakat Rentan	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan dalam Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya Perangkat Daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indikator tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	0	47,8	56,4	62,3	67,3	70,1	72,2	
3.	Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Predikat Nilai Sakip	Angka	61,85	64,50	67,20	70,50	72,80	74,20	76,50	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Indikator kinerja kunci Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 dimaksud, dapat diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	



3.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan. Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
----	--	---------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan penjabaran Rencana Strategis Periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan dinas, ketatalaksanaan, SDM, anggaran dan komitmen seluruh jajaran ASN yang ada. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra, termasuk indikator kinerja yang ada dalamnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2025-2029.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025-2029 dijadikan acuan kerja bagi unit kerja yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025-2029.

Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Sidenreng Rappang pada setiap tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang



RENSTRA 2025-2029 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

terkait dengan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, September 2025
Kepala Dinas Sosial



WAHIDAH ALWI, SP., MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

19710315 199803 2 003